



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**“PERAN MASYARAKAT DALAM MENGEMBALIKAN FUNGSI HUTAN
MANGROVE DI TINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
26 TAHUN 2020 TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN”**

**(Studi Kasus Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah
Kabupaten Indragiri Hilir)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)**



OLEH:

JEFRI HADI

11720714658

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Peran Masyarakat Dalam Mengembalikan Fungsi Hutan Mangrove Di Tinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan” (Studi Kasus Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir)** yang ditulis oleh:

Nama : JEFRI HADI
NIM : 11720714658
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru; 18 Mei 2021

Pembimbing Skripsi



JONI ALIZON SH. MH
NIK. 13021704 1

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“PERAN MASYARAKAT DALAM MENGEMBALIKAN FUNGSI HUTAN MANGROVE DI TINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN”* (Studi Kasus Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir) yang ditulis oleh :

Nama : **JEFRI HADI**
 NIM : 11720714658
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 09 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji I
Muslim, S. Ag, SH, M. Hum

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

.....

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Peran Masyarakat Dalam Mengembalikan Fungsi Hutan Mangrove Di Tinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan” (Studi Kasus Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir). Peran masyarakat terhadap hutan mangrove di Desa Bantayan Kecamatan Mandah sangat dibutuhkan dalam mengembalikan fungsi hutan mangrove sebagaimana dijelaskan Pasal 51 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yaitu berupa penyediaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan.

Rumusan Masalah penelitian ini adalah bagaimana peran masyarakat dalam mengembalikan fungsi hutan mangrove di tinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ? dan apa faktor penghambat dalam mengembalikan fungsi hutan mangrove di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ?. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran masyarakat dalam mengembalikan fungsi hutan mangrove ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam mengembalikan fungsi hutan mangrove di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

Metode penelitian skripsi ini yaitu hukum sosiologis dengan melakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai yaitu kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah, seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan, dan kepala desa Bantayan, serta penyebaran angket kepada masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Pengambilan sampel ini adalah *purposive sampling* dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu untuk mewakili populasi.

Hasil penelitian menunjukkan peran masyarakat terhadap hutan mangrove di Desa Bantayan Kecamatan Mandah belum terlaksana dengan baik. Sedangkan faktor penghambat dalam mengembalikan fungsi hutan mangrove di Desa Bantayan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2020, kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat terkait peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2020, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah setempat kepada masyarakat terhadap hutan mangrove di Desa Bantayan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, sesuai dengan waktu yang di jadwalkan. Shalawat beriring salam terucap kepada junjungan alam yakni Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu teknologi.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis menyapaikan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayah Suhardi dan Ibu Halimah, serta Adek M. Padlan yang telah memberikan motivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih Bapak dan Ibu atas do'a restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH, MH dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Bapak Muslim S. Ag, SH, M. Hum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Joni Alizon SH, MH sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Nurhidayat SH, MH selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terkhususnya Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Abang Khairul Ishak, SH, MH dan Abang Al-Mario, SH yang telah memberikan masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada kawan-kawan kelas IH D dan HTN E, serta kawan-kawan seangkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.
10. Kepada kawan-kawan Tim KKN-DR Tembilahan Kota yang telah memberikan inspirasi dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada kawan-kawan Anak Rantau Desa Bantayan Pekanbaru yang telah memberikan masukan, saran, serta support demi kelancaran pembuatan skripsi ini.
12. Kepada kawan-kawan PKL Pengadilan Negeri Tembilahan yang telah memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini.
13. Kepada sepupu Pajar Sapika S. Kom dan Syaidir Rahman SE, Sy yang telah mengasih idenya kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Kepada Isnan Rasyidi, Hasnan Muklis, Jefri Yanto, Muhammad Novri, Widia, Erma Liana, Sonia Arianda, M. Pernanda Yusuf A. P, M. Haikal Padli, dan Rehanil Jannah teman satu diskusi yang memberikan ilmu-ilmu baru.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan bisa menambahkan khasanah ilmu pengetahuan. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru; 15 Juni 2021

JEFRI HADI
NIM. 11720714658



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM	17
A. Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir.....	17
B. Sejarah Desa Bantayan.....	20
C. Sejarah UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah.....	23
BAB III TINJAUAN TEORI	27
A. Rehabilitasi Hutan.....	27
B. Reklamasi Hutan.....	30
C. Pengertian Hutan Mangrove.....	33
D. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hutan Mangrove	41
E. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020.....	53



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Peran Masyarakat Dalam Mengembalikan Fungsi Hutan Mangrove Di Tinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir	58
B. Faktor Penghambat Dalam Mengembalikan Fungsi Hutan Mangrove di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir	70
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. 1	: Populasi dan Sampel..... 11
Tabel II. 1	: Pemerintahan Desa Bantayan dan Dusun 22
Tabel II. 2	: Struktural UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah 26
Tabel IV. 1	: Tanggapan Responden Apakah Mengetahui Hutan Mangrove/Bakau 61
Tabel IV. 2	: Tanggapan Responden Apakah Bermanfaat Hutan Mangrove 62
Tabel IV. 3	: Tanggapan Responden Kondisi Hutan Mangrove Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah 64
Tabel IV. 4	: Tanggapan Responden Tentang Program Penanam Hutan Mangrove Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah..... 65
Tabel IV. 5	: Tanggapan Responden Apakah Pernah Terlibat Dalam Menjaga Dan Ikut Serta Dalam Program Rehabilitasi Hutan Mangrove Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah..... 67
Tabel IV. 6	: Tanggapan Responden Apakah Pernah Terjadi Bencana Alam Akibat Adanya Aktivitas Penebang Hutan Mangrove Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah..... 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV. 7

: Tanggapan Responden Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i
Mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi
Hutan..... 72

Tabel IV. 8

: Tanggapan Responden Apakah Ada Sosialisasi
Dari Pemerintah Setempat Terkait Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang
Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan Di Desa
Bantayan Kecamatan Mandah..... 74

Tabel IV. 9

: Tanggapan Responden Apakah Ada Pengawasan
Dari Pihak Terkait Terhadap Hutan Mangrove
Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah 75

.....



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.¹ Indonesia pada dasarnya penyelenggaraan urusan pemerintah berada pada kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanyalah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi, dekonsentralisasi maupun tugas pembantuan.

Penerapan desentralisasi dan dekonsentralisasi pada negara kesatuan adalah merupakan perwujudan dari *distribution of power* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintah pusat.²

Semenjak dicanangkan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang membawa pergeseran paradigma terhadap penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintahan desa. Inilah konsekwensi dari sebuah tuntutan kebijakan dan paradigma baru yang harus dipilih. Undang-undang ini telah memberikan otonomi yang jauh lebih besar kepada daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1).

² Moh. Kusnardi, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 1993), h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusan daerah masing-masing dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat daerah bersangkutan serta dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur pembagian urusan pemerintahan termasuk bidang kehutanan dengan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren-pilihan, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota. Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut, urusan pemerintahan dibidang kehutanan hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi kecuali yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya Kabupaten atau Kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kota.³

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada kita merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya dan wajib disyukuri. Hutan sebagai salah satu kekayaan alam yang menjadi modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat baik itu manfaat ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi.

³ Steven Yohanes Kambey, *Pembagian Urusan di Bidang Kehutanan*, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015, h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini hutan mangrove mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjebak dan menahan sedimen, meredam badai pantai, dan energi gelombang, memberi perlindungan bagi juvenile ikan dan biota laut lainnya serta mengasimilasi nutrisi untuk dikonversi menjadi jaringan tumbuhan. Mangrove juga berperan penting sebagai filter terhadap pencemaran laut yang datang dari daratan.

Wilayah pesisir merupakan suatu daerah peralihan antara ekosistem daratan dan lautan yang memiliki produktivitas hayati tinggi. Adanya pasokan unsur hara dari daratan melalui aliran sungai dan aliran air permukaan ketika hujan, serta tumbuh dan berkembangnya berbagai ekosistem alami seperti halnya hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan estuaria, menyebabkan wilayah pesisir sangat subur. Kawasan hutan wilayah pesisir pada berbagai daerah di Indonesia terutama di pantai utara Jawa, Sumatera, Sulawesi Selatan, Bali, dan Kalimantan Timur telah mengalami degradasi akibat kerusakan hutan. Saat ini bisa dikatakan sebagian besar kawasan

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

mangrove berada dalam kondisi rusak, bahkan di beberapa daerah kondisinya sangat memprihatinkan. Tercatat laju degradasi mangrove mencapai 160-200 ribu ha/tahun.⁵

Ekosistem mangrove (bakau) adalah suatu sistem alam tempat berlangsungnya kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya dan diantara makhluk hidup itu sendiri, serta terdapat pada wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga pantainya selalu tergenang air.⁶ Ekosistem mangrove berada di antara level pasang naik tertinggi sampai level di sekitar atau di atas permukaan laut rata-rata pada daerah pantai yang terlindungi, dan menjadi pendukung berbagai jasa ekosistem di sepanjang garis pantai di kawasan tropis.

Secara umum, masyarakat pesisir secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh keberadaan hutan mangrove. Secara langsung hutan mangrove menyediakan berbagai sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan secara tidak langsung menyediakan oksigen dan pelindungan wilayah pesisir.⁷

Keberadaan hutan mangrove yang berhubungan dengan fungsi fisik sangat berperan penting sebagai mitigasi bencana, diantaranya yaitu seperti:

1. Peredam gelombang dan angin badai bagi daerah yang ada di belakangnya,

⁵ Bambang Eko Terisno, Dkk, *Peran Serta Masyarakat dan Kewenangan Pemerintah Dalam Konservasi Mangrove Sebagai Upaya Mencegah Rob dan Banjir Serta Sebagai Tempat Wisata*. Masalah-Masalah Hukum Jilid 47 No.4, Oktober 2018, h. 5.

⁶ Sukirman Rahum, Dkk, *Hutan Mangrove dan Pemanfaatannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 1-2.

⁷ Purwowibowo, dkk, *Hutan Mangrove Pasar Bagi Rembang*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Pelindung pantai dari abrasi,
3. Gelombang air pasang (rob),
4. Tsunami,
5. Penahan lumpur,
6. Perangkap serta sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan,
7. Pencegah intrusi air laut ke daratan, dan
8. Dapat menjadi penetralisir pencemaran perairan pada batas tertentu.

Selanjutnya ekosistem mangrove berfungsi sebagai habitat berbagai jenis satwa. Ekosistem mangrove berperan penting dalam pengembangan perikanan pantai. Karena merupakan tempat berkembang biak, memijah, dan membesarkan anak bagi beberapa jenis ikan, kerang, kepiting dan udang. Jenis plankton di perairan mangrove lebih banyak dibandingkan di perairan terbuka. Serta tidak lupa hutan mangrove menyediakan perlindungan dan makanan berupa bahan organik ke dalam rantai makan. Bagian kanopi mangrove pun merupakan habitat untuk berbagai jenis hewan darat, seperti monyet, serangga, burung, dan kelelawar. Kayu pohon mangrove dapat digunakan sebagai kayu bakar, bahan pembuatan arang kayu, bahan bangunan, dan bahan baku bubur kertas.⁸ Selain itu manfaat nilai guna langsung hutan mangrove sebesar Rp. 11,61 juta/ha/th.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Kabupaten yang berada di wilayah provinsi Riau tempatnya yang strategis dan berbatasan dengan Kabupaten tetangga serta Provinsi tetangga. Kabupaten Indragiri Hilir

⁸ Eddy Elminsyah Jaya, *Skenario Berkelanjutan Pengelolaan Hutan Mangrove*, (Balikpapan: Nas Media Pustaka, 2018), h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

merupakan salah satu daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan provinsi Sumatra Tengah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan pasal 16 ayat 2 mengenai rencana umum rehabilitasi hutan dan lahan daerah aliran sungai sangat perlu dilakukan khususnya pada Desa Bantayan Kecamatan Mandah, mengingat peta ekosistem mangrove yang setiap tahunnya yang berada di Desa Bantayan mengalami penurunan.⁹ Hal ini disebabkan kepadatan penduduk telah mendekati bahkan melampaui tingkat keseimbangan rasio yang normal antara luas dampak peningkatan penduduk terhadap kelestarian hutan. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk khususnya didaerah pinggiran pantai atau daerah aliran sungai maka kebutuhan masyarakat akan kayu bakar, bahan pembuatan arang kayu, bahan bangunan, dan lain sebagainya menjadikan ekosistem hutan mangrove gundul tanpa adanya rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Maka dari itu perlu peran masyarakat sebagai mana yang dimaksud pada pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yaitu: peran serta masyarakat

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Pasal 16 ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf b dilakukan dalam penyediaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan.¹⁰

Untuk itu, pemanfaatan yang berbasis konservasi haruslah melibatkan potensi masyarakat karena luasnya hutan mangrove yang berada di Kecamatan Mandah sebesar 31. 007 hektar sehingga Kecamatan Mandah khususnya di Desa Bantayan mempunyai potensi dalam mengembalikan fungsi hutan mangrove sebagai *spawning ground, feeding ground*, dan juga *nursery ground*. Serta dapat juga memiliki keuntungan bagi masyarakat lewat ketersediaan peluang kerja sehingga menambah penghasilan mereka.¹¹ Tidak hanya melalui pemerintah saja dalam mengembalikan fungsi hutan mangrove semestinya. Karena sedikit banyaknya kerusakan hutan mangrove itu diakibatkan ulah nakal manusia itu sendiri yang bisa saja menyebabkan banjir, angin puting beliung, dan sebagainya. Fakta ini sejalan dengan pendapat salah seorang pakar pengendalian hutan mangrove atau bakau yaitu Nurdin Harahab, yang mengatakan bahwa penebangan hutan bakau dapat menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, dan abrasi pantai yang pada akhirnya merugikan materil dan terganggunya aktifitas perekonomian.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang ditulis dalam tulisan ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“PERAN MASYARAKAT DALAM MENGEMBALIKAN**

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabiltasi dan Reklamasi Hutan Pasal 51 huruf (b).

¹¹ Sri Puryono Karto Soedarmo, *Pelestarian Hutan Mangrove dan Peran Serta Masyarakat Pesisir*, (Semarang: Undip Press, 2018). h. 19.

¹² Nurdin Harab, *Penelitian Ekonomi Hutan Mangrove dan Aplikasinya Dalam Perencanaan Wilayah Pesisir*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), h. 66.

FUNGSI HUTAN MANGROVE DI TINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN (Studi Kasus Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah)”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari yang dipermasalahkan. Maka penulis hanya membatasi permasalahan tentang “Peran Masyarakat Dalam Mengembalikan Fungsi Hutan Mangrove Di Tinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Masyarakat Dalam Mengembalikan Fungsi Hutan Mangrove Di Tinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Apa Faktor Penghambat Dalam Mengembalikan Fungsi Hutan Mangrove Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Peran Masyarakat Dalam Mengembalikan Fungsi Hutan Mangrove Di Tinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dalam Mengembalikan Fungsi Mangrove Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk Menambah Pengetahuan Penulis Mengenai Peran Masyarakat Dalam Mengembalikan Fungsi Hutan Mangrove Di Tinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tentunya bagi Desa Bantayan.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir serta UPT yang bersangkutan adalah UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soerkanto maksud dari penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin.¹³

Dan dalam hal ini tentunya akan memberikan gambaran tentang bagaimana Peran Masyarakat Dalam Mengembalikan Fungsi Hutan Mangrove Di Tinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek penelitian yang menjadi sasaran pengamatan berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan

¹³ Soerjono Soerkanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 2011), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya.¹⁴ Sedangkan untuk sampel itu sendiri merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.¹⁵

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah 1 orang, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 1 orang, Kepala Desa 1 orang, serta Masyarakat 2.384 orang. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah salah satu teknik sampling non random yang dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian ini.¹⁶

Untuk lebih jelas perincian populasi dan sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1.	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah.	1 orang	1 orang	100%

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 118.

¹⁵ Subagyo Jotako, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 1.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 95-96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.	1 orang	1 orang	100%
3.	Kepala Desa.	1 orang	1 orang	100 %
4.	Masyarakat.	2.384 orang	95 orang	4%
Jumlah		2.399 orang	104 orang	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data secara langsung dilapangan melalui observasi, wawancara, dan angket terhadap informan penetian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu: Peran Masyarakat Dalam Mengembalikan Fungsi Hutan Mangrove Di Tinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.¹⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya seperti lewat dokumen, surat kabar, bulletin dan lain sebagainya. Data sekunder yang berhubungan

¹⁷ Deribson Siagian Sugiarto, *Metode Statiska*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan data yaitu mengenai Peran Masyarakat Dalam Mengembalikan Fungsi Hutan Mangrove Di Tinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.¹⁸

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam bab ini adalah kamus besar bahasa Indonesia, serta data-data dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan suatu pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.¹⁹

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi. Wawancara yaitu mengambil pendapat dan informasi dari responden dengan mengadakan dialog langsung untuk mendapatkan informasi secara langsung dari orang yang di wawancar.²⁰ Yaitu mengenai Peran Masyarakat Dalam Mengembalikan Fungsi Hutan Mangrove Di Tinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan Di Desa

¹⁸ Ibid, h. 17.

¹⁹ Christine Daymon Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations & Marketing Communications*, (Yogyakarta: PT. Benteng Pustaka, 2008), h. 319.

²⁰ Op.cit, Lexy J. Moleong, h. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun pihak-pihak terkait yang di wawancara oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah.
 2. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.
 3. Kepala Desa.
- c. Angket

Angket adalah alat pengumpulan data untuk kepentingan penelitian. Angket digunakan dengan mengedarkan formulir yang berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Adapun responden yang akan diberikan formulir angket adalah masyarakat.²¹

- d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apa bila di dukung foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 142.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisa data, mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan yang dikelola.²² Proses analisis data dimulai dengan masalah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang didapatkan baik itu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Selanjutnya pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian analisis *deskriptif kualitatif* yaitu setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisa dengan data yang telah terkumpul.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir mengenai peran masyarakat dalam mengembalikan fungsi hutan mangrove.

²² Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Kasinus, 2008), h. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang peran masyarakat dalam mengembalikan fungsi hutan mangrove atau Rehabilitasi di Desa Bantayan Kabupaten Indragiri Hilir, baik itu terdiri dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah, tugas dan wewenang Kepala Daerah, bentuk dan jenis Perangkat Desa serta masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian tentang peran masyarakat dalam mengembalikan fungsi hutan mangrove di tinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang dicantumkan dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir adalah kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia yang memiliki motto: “Berlayar sampai kepulau, berjalan sampai kebatas”. Kabupaten Indragiri Hilir beribu kota di Tembilahan yang berdiri pada tanggal 20 November 1965 dan saat ini berjumlah penduduk sekitar 717. 803 jiwa yang tersebar di 20 kecamatan, 38 kelurahan, dan 198 desa.²³

Suku-suku yang tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir yang beragam-ragam terhitung dari suku bugis, melayu, banjar, jawa, tionghoa, dan lain sebagainya. Dengan agama yang mendominasi adalah Islam, serta diikuti dengan agama Budha dan Kristen. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan provinsi Sumatra Tengah berdasarkan Ssrat keputusan Gubernur Kepala Daerah

²³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir#:~:text=Kerajaan%20Indragiri%20diperkirakan%20berdiri%20tahun,Datuk%20Patih%20atau%20Perdana%20Menteri. Diakses pada tanggal 11 Januari 2021, jam 20:42 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tingkat I Riau (Provinsi Riau) tanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat dan amanat pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah menjadikan: “Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang 2025”. Keberhasilan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengembangkan wilayahnya yang memiliki kekhasan sebagai wilayah pasang surut dan bergambut, menjadi sebuah wilayah yang telah berkembang, maju, dan terbuka adalah merupakan bukti bahwa di wilayah lahan marginal telah dapat diwujudkan suatu kehidupan yang menjadikan bagi masa depan daerah dan masyarakat yang setara dengan daerah-daerah lainnya yang sifat lahan wilayahnya jauh lebih berpotensi.

Tingkat kemajuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diukur dengan menggunakan ukuran-ukuran yang lazim digunakan dalam melihat tingkat kemakmuran yang tercermin dari pada tingkat pendapatan dan distribusinya dalam masyarakat. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat dan semakin meratanya distribusinya pendapatan tersebut dalam masyarakat, maka akan semakin maju tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Demikian pula dari sisi mutu sumberdaya manusianya dengan menggunakan indikator sosial budaya yang dapat dilihat dari tingkat penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang tercermin melalui tingkat pendidikan masyarakat terendah, dan budaya masyarakat, sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk derajat kesehatan masyarakat dilihat dari angka harapan hidup yang semakin panjang.

Selanjutnya, disamping indikator-indikator ekonomi dan sosial budaya tersebut, juga indikator politik, hukum, keamanan dan ketertiban adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dapat dijadikan indikator dalam mengukur kemajuan daerah. Suatu kemajuan yang hebat dapat dicapai melalui pengelolaan yang lebih baik terhadap sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan yang bersinergi, sistematis dan konseptual antara kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur perekonomian daerah.

Secara umum Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai timur pulau Sumatera yang merupakan gerbang selatan provinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 Km² serta dengan jumlah penduduk kurang lebih 717. 803 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis. Indragiri Hilir pada saat ini lebih dikenal dengan julukan negeri seribu parit yang dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut serta berbatasan langsung dengan Kabupaten dan Provinsi tetangga. Adapun batasan wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:²⁴

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan,

²⁴ <https://www.riau.go.id/home/content/18/kab-indragiri-hilir>, Diakses pada tanggal 11 Januari 2021, Jam 21:15 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi. Jambi,
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu, dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

B. Sejarah Desa Bantayan

Desa adalah pemerintahan lokal yang dibentuk oleh masyarakat adat. Secara historis, struktur pemerintahan desa telah terjadi semenjak masa kolonial Hindia-Belanda dengan diberlakukannya *Inlandse Gementee Ordonance* (IGO). Akibat adanya ordonansi tersebut, pemerintahan desa memiliki hak otonom untuk mengelola pemerintahannya, sehingga dapat mengangkat pemimpin desa atau saat ini disebut kepala desa.²⁵

Namun pada masa Orde Baru, terjadi perubahan yaitu desa berstatus sebagai organ administrasi pemerintah di bawah kecamatan yang merupakan perangkat pemerintah yang merupakan perangkat pemerintah pusat di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (UU Pemerintahan Desa).

Secara geografis dan secara administrasi Desa Bantayan merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) desa yang berada di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dengan memiliki luas hutan mangrove yaitu: 2.404.67 Ha.²⁶ Desa Bantayan merupakan pemekaran dari Desa Bakau Aceh

²⁵ Criksetra, *Pemerintahan Nagori Rabuhit 1968-2017*, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8 No. 2, 2019, h. 44.

²⁶ Joko Yuni Purwanto, (Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah), *Wawancara*, Tanggal 18 Februari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang di mekarkan pada tahun 2006 dengan kepemimpinan kepala Desa pertama yaitu Bapak Badul dengan masa kepemimpinan dua tahun setengah dikarenakan meninggal dunia. Selanjutnya disambung dengan kepemimpinan Kepala Desa kedua yang dipimpin dua priode yang di pimpin oleh Bapak Maslan sampai dengan sekarang.

Secara umum, Desa Bantayan berbatasan langsung dengan sebelah barat berbatasan dengan Desa Pelanduk, sebelah timur Desa Bakau Aceh, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batang Tumu, serta sebelah utara berbatasan langsung dengan dusun tiga dengan ibu dusun yaitu Tadah Pasang.²⁷ Jumlah penduduk Desa Bantayan berdasarkan profil desa pada tahun 2020 berjumlah penduduk yaitu 2.384 orang (dua ribu tiga ratus delapan puluh empat orang) dengan mata pencarian yaitu: bercocok tanam, dan nelayan.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa, pemerintahannya memiliki beberapa urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab atau tugas pemerintahan desa yang secara umum ada dua jenis urusan pemerintahan desa diantaranya yaitu: urusan Dekonsentrasi yang mana urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang lebih atas. Pemerintahan itulah yang merencanakan, membiayai, mengawasi, dan bertanggung jawab secara keseluruhan. Selanjutnya urusan Partisipatif, yaitu urusan-urusan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi dalam pelaksanaanya diserahkan kepada masyarakat desa yang bersangkutan sebagai sarana pendidikan dalam pembangunan.

²⁷ Asbi, (Masyarakat Desa Bantayan), *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2021.

Selanjutnya dalam menjalankan roda pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya pastinya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri sekretaris desa dan kepala-kepala dusun. Sekretaris desa meliputi sekretaris desa dan kepala urusan-urusan. Yang secara institusional hal itu dapat digambarkan sebagai berikut:²⁸

Tabel II. 1

Pemerintahan Desa Bantayan dan Dusun

No.	Nama	Jabatan
1.	Maslan	Kepala Desa
2.	Mazrah, SE	Sekretaris Desa
3.	Suparmi	Kepala Urusan Keuangan
4.	Yesme Rezika Elva, S. Pd	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
5.	Maspar	Kepala Seksi Kesejahteraan
6.	Eliyanti, SE	Kepala Seksi Pemerintahan
7.	Nadia Deswiranita	Staf
8.	Rudi Hartono	Staf
9.	Ida Herna	Staf

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

²⁸ Maslan, (Kepala Desa Bantayan), *Wawancara*, 5 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

No.	Kepala Dusun	
1.	Muhammad, A. Ma	Kepala Dusun I
2.	Ahmad	Kepala Dusun II
3.	Edi Pahrizal Putra, S. Pdi	Kepala Dusun III
4.	Julianto	Kepala Dusun IV

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021

C. Sejarah UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah merupakan suatu wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Secara konseptual pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diyakini sebagai salah satu cara memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia. Namun dalam hal ini kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) belum sepenuhnya diakui oleh semua *stakeholders* sehingga berimplikasi terhadap operasionalisasi di lapangan.²⁹

Secara umum, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan sebuah institusi semi mandiri secara finansial (*self-financing management unit*) yang mana dalam hal ini secara profesional mampu mengakomodisasi aspek ekologi, sosial, serta ekonomi yang mempunyai ciri publik dan privat sekaligus

²⁹ Sulistya Ekawati, dkk, *Analisis Kesiapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta Sebagai Badan Layanan Umum Daerah*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 15 No. 1 Mei 2018, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lazim disebut sebagai lembaga *quasi* pemerintahan dan *quasi* publik. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit XXVI atau dikenal sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah-Reteh berada pada wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Secara geografis wilayah KPH Unit XXVI, KPH Mandah-Reteh terletak pada posisi antara 1030 06' 07,813" BT – 1030 47' 18,739" BT dan 00 31' 26,643" LU – 00 45' 44,090" LS. Wilayah KPH Unit XXVI, KPH Mandah-Reteh berdasarkan wilayah pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), KPH Unit XXVI, KPH Mandah-Reteh termasuk ke dalam 21 DAS yang sebagian besar wilayahnya berada di dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri.

Selain itu, luas wilayah Wilayah KPH Unit XXVI, KPH Mandah-Reteh berdasarkan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menjawab surat tersebut melalui surat Nomor : S.632/VII-WP3H/2010 tanggal 15 September 2010 perihal Arahan Pencadangan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Riau, luas wilayah KPH Unit XXVI, KPH Mandah-Reteh adalah ± 90.157,81 Ha. Kemudian SK.736/ MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017 tentang Penetapan Lokasi Fasilitas Pada 1 (satu) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan 6 (enam) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Riau tanggal 29 Desember 2017, luas wilayah KPHP Unit XXVI, KPH Mandah-Reteh adalah ± 117.912,00 Ha. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 470/MENLHK/ SETJEN/PLA.0/7/2019 tentang Penetapan Wilayah KPH di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Provinsi Riau, luas wilayah KPH Unit XXVI, KPH Mandah-Reteh menjadi \pm 117.678,00 Ha, yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 19.888,00 Ha, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 7,00 Ha, dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 97.783,00 Ha. Luas final yang digunakan dalam penyusunan RPHJP KPH Unit XXVI, KPH Mandah-Reteh adalah seluas 117.678,00 Ha.³⁰

Secara administratif KPH Unit XXVI, KPH Mandah-Reteh seluruhnya berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, yang meliputi 16 (enam belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Batang Tuaka, Kecamatan Concong, Kecamatan Enok, Kecamatan Gaung, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kecamatan Kateman, Kecamatan Kuala Indragiri, Kecamatan Mandah, Kecamatan Pelangiran, Kecamatan Pulau Burung, Kecamatan Reteh, Kecamatan Sungai Batang, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Teluk Belengkong, Kecamatan Tembilahan dan Kecamatan Tembilan Hulu yang berbatasan langsung yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pulau Merbau.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandah-Reteh Timur dan Kecamatan Mandah-Reteh.

Dalam menjalankan roda pemerintahan pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah salah satu komponen yang menentukan

³⁰ Sumber Data UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah, Pada Tanggal 18 Februari 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberhasilan suatu misi pada suatu organisasi adalah adanya aparatur pelaksana terdiri dari 30 orang (tiga puluh orang) pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah yang mana dalam hal ini terdiri dari, yaitu:

Tabel II. 2

Struktur UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah

No.	Nama	Jabatan
1.	Joko Yuni Purwanto, S. Hut	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah
2.	Zainah, S. Sos	Subbagian Tata Usaha
3.	Adha Riawan, SE	Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
4.	Yulian Indra, SE	Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam, Ekosistem, dan Pemberdayaan Masyarakat

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Rehabilitasi Hutan

Area lahan kritis di Indonesia makin hari makin terus bertambah, maka untuk itu pemerintah melakukan suatu perencanaan suatu kegiatan yang disebut dengan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Rehabilitasi di kawasan hutan dilaksanakan di semua kawasan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional, dan diluar kawasan yang dilaksanakan di semua lahan kritis. Bentuk rehabilitasi adalah melakukan suatu penghijauan, pemeliharaan, dan pengayaan tanaman, penerapan teknik konservasi secara vegetasi dan sipil teknis. Tujuan dilakukan suatu rehabilitasi yaitu adalah dimana bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan, dan melakukan suatu peningkatan fungsi hutan serta lahan supaya dapat berfungsi sebagai media produksi dan media tata air.

Secara umum, luas lahan hutan yang saat ini terdegrasi di Indonesia sudah mencapai kondisi yang sangat mengkhawatirkan yaitu meliputi 48,5 juta Ha yang terdiri dari 26,6 juta lahan Ha lahan di dalam hutan, 21,9 juta Ha lahan diluar hutan, dan 11,40 juta Ha lahan sebagai konsesi pertambangan. Sementara pada tahun 2018, luas lahan kritis di Indonesia sudah mencapai 14.006.450 Ha.³¹

³¹ Tatik Kartika, *Evaluasi Rehabilitasi Lahan Kritis Berdasarkan Trend Ndzi Landsat-s*, Jurnal Venginderaan Jauh, Vol. 16, No. 2, Desember 2019, h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Degradasi hutan yang terjadi serta banyaknya jumlah lahan kritis, maka dalam hal ini akan memberikan berbagai macam efek buruk, sehingga diperlukan suatu upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk menekan suatu degradasi hutan maupun memperbaiki suatu lahan kritis.³² Rehabilitasi merupakan suatu program yang mana menyangkut segala aspek, serta memerlukan waktu yang lama (*multiyears*), yang melibatkan berbagai pihak, serta menggunakan sumber daya yang tidak sedikit. Dalam upaya mengetahui tingkat suatu keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan, dalam menekan suatu resiko kegagalan atau meningkatkan tingkat keberhasilan, maka diperlukan berbagai proses tindakan manajemen yang salah satunya adalah evaluasi rehabilitasi hutan dan lahan maupun perencanaan yang matang.

Perencanaan kehutanan merupakan salah satu kegiatan dalam bidang kehutanan yang memegang suatu peranan yang sangat penting, karena kegagalan dalam melakukan suatu perencanaan akan berdampak negatif terhadap kelangsungan hutan tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan suatu perencanaan kehutanan ini maka akan saling berkaitan pula dengan pengurusan hutan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 10 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan pengerusakan hutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.³³ Selain itu di dalam suatu kawasan hutan, rehabilitasi menjadi

³² Aris Jatmiko, dkk, *Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Menggunakan Analisis Multi Kreteria*, Jurnal Ilmu Kehutanan, Volume VI, No. 1. Januari-Maret 2012, h. 31.

³³ Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 4 ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tanggung jawab pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, dengan melibatkan masyarakat. Sedangkan diluar kawasan hutan rehabilitasi menjadi suatu tanggung jawab masyarakat dengan dukungan bantuan pemerintah. Yang mana dalam hal ini program rehabilitasi hutan termasuk dalam program pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Pada dasarnya rehabilitasi hutan mangrove sangatlah perlu dan penting dilakukan untuk memperbaiki luasan mangrove yang telah rusak dan memperbaiki fungsi mangrove. Upaya tersebut bisa kita lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.³⁴

- a. Pemahaman kondisi wilayah yang mana dalam hal ini dalam melakukan suatu pemilihan tempat ideal untuk suatu perkembangan mangrove terdapat pada pantai-pantai di teluk yang dangkal, muara sungai, bagian yang terlindung dari tanjung, dan selat yang terlindung. Sebelum melakukan kegiatan penanaman mangrove, terlebih dahulu kita harus mengetahui kondisi pantai dan masyarakat. Yang mana kondisi masyarakat yang perlu diketahui baik dari struktur sosial, bentuk pemanfaatan, intensitas interaksi wilayah pesisir oleh masyarakat, persepsi masyarakat terhadap mangrove, dan rencana penanaman yang akan dilakukan.
- b. Pembibitan dan persemaian mangrove yang mana pada dasarnya, kegiatan pembibitan mangrove dapat dilakukan jika pohon atau buah di sekitar lokasi penanaman jumlahnya hanya sedikit atau tidak ada. Dan disisi lain,

³⁴ Ahmad Muhtadi Rangkuti, dkk, *Ekosistem Pesisir & Laut Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembibitan mangrove dapat tidak dilakukan jika pohon atau buah mangrove di sekitar lokasi penanaman dalam jumlah yang banyak. Selain itu, penanaman melalui pembibitan akan menghasilkan persentase tumbuh yang tinggi.

- c. Penanaman mangrove yaitu dimana kita harus memperhatikan beberapa faktor fisik penunjang keberhasilan penanaman mangrove. Faktor fisik tersebut, yaitu keadaan pasang surut, musim, ombak, dan kesesuaian jenis tanaman dengan lingkungannya. Selain faktor fisik, terdapat faktor lain yang turut menentukan suatu keberhasilan penanaman mangrove, yaitu keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat merasa memiliki mangrove dan berkeinginan untuk menjaga dan memelihara tanaman mangrove.
- d. Pemeliharaan terhadap gangguan dimana dapat dilakukan dengan penyiangan dan penyulaman. Kegiatan penyiangan ini perlu dilakukan jika penanaman mangrove di daerah terbuka dan lokasinya lebih ke arah darat dengan kadar lumpur yang tipis. Selanjutnya penyulaman dilakukan jika ada tanaman mangrove yang mati. Penyulaman dapat dilakukan menggunakan benih atau bibit.

B. Reklamasi Hutan

Reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris *to reclaim* yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, disebutkan arti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

dari *reclaim* yaitu menjadikan tanah (*from the sea*). Selain itu, dalam kamus yang sama arti suatu kata *reclamation* diterjemahkan sebagai suatu pekerjaan yang memperoleh tanah. Selanjutnya reklamasi hutan juga meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dengan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Reklamasi hutan dilakukan pada kawasan hutan rusak yang telah mengalami perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah yang mana dalam hal ini kegiatan suatu reklamasi terdiri dari:³⁵

- a. Penataan lahan,
- b. Pengendalian erosi dan sedimentasi, dan
- c. Revegetasi.

Pada dasarnya proses suatu reklamasi membutuhkan waktu yang panjang yang mana membutuhkan sisi legalitas dalam pelaksanaannya.

Beberapa peraturan penataan ruang mendudukan beberapa Undang-undang sebagai landasan aspek legalitas seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang akan menjadi arahan dalam klasifikasi kawasan lindung, pemanfaatan ruangnya, dan juga dikawasan budidaya.³⁶ Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang bersifat memayungi seluruh kegiatan penyusunan berbagai dokumentasi dikawasan ini.³⁷ Yang mana pada dasarnya semua peraturan penataan ruang ini

³⁵ Hengki Simanjuntak, *Paradigma Rehabilitasi dan Reklamasi Kawasan Hutan*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2021), h. 8.

³⁶ Undang-Undang No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

³⁷ Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan upaya untuk menuju pada penetapan acuan pemerintah daerah mengenai bentuk tipologi zona kawasan reklamasi pantai, pemanfaatan ruang kawasan reklamasi, dan penentuan struktur, dan pola ruang kawasan reklamasi hutan.

Secara umum, dalam proses perencanaan penataan ruang pada kawasan reklamasi ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan diantaranya yaitu:

- a. Faktor kesiapan kawasan reklamasi yang mana menjadi suatu hal yang paling utama sebelum seluruh kegiatan di kawasan tersebut berjalan. Serta perlu untuk dipertimbangkan beberapa hal yaitu: seperti perhitungan terhadap aspek struktur bangunan pantai dan persyaratannya, metode reklamasi yang digunakan, bahan pengurugan yang dipakai, lokasi pengambilan bahan urugan dan standarnya.
- b. Faktor implementasi proses reklamsi yang mana dalam hal ini proses reklamasi akan terkait berbagai persyaratan yang harus dipertimbangkan terutama yang terkait dengan bangunan laut, proses pembebanan sementara, pengurugan, dan pemadatan, *geotextile*, dan *vertical drain*.
- c. Faktor paska reklamasi dimana dalam hal ini akan berkaitan dengan berbagai persyaratan teknis yang dibutuhkan seperti persyaratan konstruksi baja dan beton, maupun bangunan lainnya.
- d. Faktor pengendalian dampak negatif lingkungan yang dalam proses ini reklamasi merupakan campur tangan manusia melawan alam di kawasan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pantai, seperti adanya limpasan air sebagai dampak dari reklamasi yang akan mengakibatkan banjir di kawasan lain.³⁸

Maka untuk itu, dalam mengatasi suatu dampak suatu reklamasi pada suatu hutan haruslah dilakukan sesuatu untuk menanggulangi akibat yang terjadi dari suatu reklamasi dengan cara membuat suatu prasarana penanggulangan, agar dapat mencegah suatu akibat yang bisa saja ditimbulkan oleh suatu reklamasi hutan yaitu dengan melihat:³⁹

- a. Timbulnya ekosistem baru yang mungkin saja akan sangat berbeda dengan ekosistem asli suatu hutan.
- b. Terjadinya dampak lingkungan yang diakibatkan oleh hilangnya fungsi alami lahan rendah karena tindakan reklamasi terhadapnya.

C. Pengertian Hutan Mangrove

Hutan mangrove adalah merupakan suatu komunitas vegetasi pantai tropis, serta merupakan suatu komunitas yang hidup di dalam kawasan yang lembab dan berlumpur. Yang mana dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove pada dasarnya disebut juga sebagai hutan pantai, hutan payau, atau dikenal dengan nama hutan bakau. Pengertian suatu mangrove sebagai hutan pantai adalah merupakan suatu pohon-pohon yang tumbuh di daerah pantai (pesisir), baik itu daerah yang dipengaruhi pasang surut air laut maupun suatu

³⁸ Cb Herman Edyanto, *Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Proses Reklamasi Untuk Mengantisipasi Bencana di Lingkungan Pantai*, Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana, Vol. 11, No. 1, 2016, h. 4-5.

³⁹ H.R Mulyanto, *Reklamasi Lahan Rendah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

wilayah daratan pantai yang dipengaruhi oleh ekosistem pesisir. Sedangkan pengertian mangrove sebagai hutan payau atau hutan bakau adalah pohon-pohon yang tumbuh di daerah payau pada tanah aluvial atau pertemuan air laut dan air tawar disekitar muara sungai.⁴⁰

Secara umum, ekosistem hutan payau (ekosistem hutang mangrove) termasuk suatu tipe ekosistem hutan yang tidak terpengaruh oleh iklim, selain itu juga faktor lingkungan yang sangat dominan dalam pembentukan ekosistem itu adalah faktor edafis. Yang mana salah satu faktor lingkungan lainnya yang sangat menentukan suatu perkembangan hutan payau adalah salinitas atau kadar garam .

Vegetasi yang terdapat pada suatu ekosistem hutan payau pada dasarnya di dominasi oleh tumbuhan yang mempunyai akar napas atau *pneumatofora*. Disamping itu juga, spesies pada tumbuhan yang hidup dalam ekosistem hutan payau (ekosistem hutan mangrove) adalah merupakan spesies tumbuhan yang memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap salinitas payau dan harus hidup pada kondisi lingkungan yang demikian, sehingga spesies tumbuhannya disebut sebagai tumbuhan *halophytes obligat*.

Pada dasarnya ekosistem payau (ekosistem mangrove) di Indonesia memiliki keanekaragaman spesies tumbuhan yang mana tinggi dengan jumlah spesies tercatat sebanyak lebih kurang dua ratus dua spesies yang terdiri atas delapan puluh sembilan spesies pohon, lima spesies palem, sembilan belas

⁴⁰ Nuddin Harahab, *Penilaian Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove dan Aplikasinya Dalam Perencanaan Wilayah Pesisir*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spesies liana, empat puluh empat spesies epifit, dan satu spesies sikas. Spesies-spesies pohon utama di daerah payau yang mana pada umumnya membentuk tegakan murni dan merupakan ciri khas komunitas tumbuhannya.⁴¹

Selanjutnya, sumber daya persisir pada hutan mangrove pada dasarnya dapat menyediakan berbagai produk dan layanan jasa lingkungan yang menunjang berbagai kebutuhan hidup dan berbagai macam aktivitas ekonomi, yang mana nantinya potensi suatu daerah tersebut dapat memberikan suatu harapan kecukupan kebutuhan hajat hidup bagi banyak masyarakat. Hal ini terletak pada pemeliharaan integritas fungsional dari sistem alami dan tidak pada konversi terhadap maksud penggunaan tunggal. Oleh karena itu, kawasan suatu persisir pantai menjadi suatu bagian yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan dan perekonomian. Seperti yang diperkirakan bahwa dengan adanya kecenderungan sumber daya daratan yang langka, target dasar pembangunan ekonomi di Indonesia akan bertumpu pada suatu zona pantai serta sumber-sumbernya.⁴² Adapun jenis-jenis hutan mangrove kita temukan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Rhizophoraceae

Jenis hutan mangrove yang pertama yang dapat kita temukan, khususnya di Indonesia adalah rhizophoraceae atau yang sering disebut hutan bakau. Pohon bakau biasanya kita temukan di pesisir pantai yang terdiri dari beberapa keluarfa, diantaranya yaitu:⁴³

⁴¹ Indriyanto, *Ekologi Hutan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 65-66.

⁴² Nuddin Harahab, *Op. Cit*, h. 28.

⁴³ Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumi, 1996), h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bakau / Stilted Mangrove (Rhizophora),
- b. Tancang / Orange Mangrove (Bruguiera), dan
- c. Tangere / Yellow Mangrove (Xylocarpus).

2. Sonneratiaceae (Perepat atau Gogem)

Jenis hutan mangrove kedua yang bisa kita temui adalah jenis sonneratiaceae ini hanya ada satu macam yaitu sonneratia atau yang biasa disebut dengan mangrove apple. Pohon ini dapat hidup di antara yang terendam air hanya 10 hingga 19 kali saja dalam satu bulan. Maka untuk itu habitat dari pohon mangrove ini bukanlah di area yang selalu basah atau terendam air.

3. Avicenniaceae (Pohon api-api)

Jenis mangrove yang selanjutnya adalah avicenniaceae atau yang dikenal dengan sebutan pohon api-api merupakan salah satu jenis pohon mangrove. Pohon api-api ini memiliki suatu kesamaan karakteristik dengan pohon diatas yaitu mangrove apple. Dimana pohon api-api ini memiliki satu jenis diantaranya yaitu avicennia yang terdiri atas white atau grey mangrove. Selain itu juga pohon mangrove api-api juga memiliki habitat yang sama dengan pohon mangrove apple di area yang terendam air sebanyak 10 hingga 19 per bulan. Jenis pohon api-api ini tentunya paling banyak tumbuh dan kita temukan di daerah yang paling dekat dengan laut dengan media tumbuh yaitu tanah yang berpasir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Famili Meliaceaa (Nyirih)

Dimana jenis hutan ini ditumbuhi oleh famili meliaceaa atau tanaman nyirih. Tanaman ini merupakan salah satu jenis mangrove yang terbagi atas dua jenis mangrove yang terbagi atas dua jenis yaitu diantaranya *Xylocarpus* dan *Hibiscus* spp. *Xylocarpus* merupakan jenis tanaman yang jumpai di daerah-daerah tertentu yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Selanjutnya *Hibiscus* spp merupakan jenis mangrove yang paling banyak dijumpai di area lokasi yang terendam air secara musiman dikarenakan tanaman ini mendominasi area tersebut.⁴⁴

Secara umum, kawasan hutan mangrove selain berfungsi secara fisik sebagai penahan abrasi pantai, sebagai fungsi biologinya, mangrove juga menjadi suatu penyedia bahan makanan bagi kehidupan manusia terutama ikan, udang, kerang dan kepiting, serta sumber energi bagi kehidupan di pantai seperti plankton, nekton, dan algae. Secara umum fungsi hutan mangrove secara fisik yaitu: menjaga garis pantai dan tebing sungai dari proses erosi atau abrasi, serta menahan atau menyerap tiupan angin kencang dan laut ke darat, menahan sedimen secara periodik sampai terbentuk lahan baru yang diakibatkan adanya penggundulan hutan yang dilakukan aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab.⁴⁵ Serta sebagai kawasan penyangga proses intruksi atau rembesan air laut ke darat, atau sebagai filter air asin menjadi tawar. Adapun fungsi kimia ekosistem mangrove adalah sebagai tempat

⁴⁴ <https://www.dictio.id/t/apa-saja-jenis-jenis-hutan-bakau-atau-hutan-mangrove-/70634>

⁴⁵ Erika J, *Mengenal Tanaman Bakau*, (Bandung, Mawar Putra Perdana, 2011), h. 3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

terjadinya proses daur ulang yang menghasilkan oksigen, yang mana sebagai penyerap karbondioksida, serta sebagai pengolah bahan-bahan limbah hasil pencemaran industri dan kapal-kapal di lautan.⁴⁶

Menyadari pentingnya suatu ekosistem mangrove sebagai salah satu ekosistem lahan basah, maka pengelolaan ekosistem mangrove perlu dilakukan secara tepat dan terpadu. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi upaya pengelolaan mangrove, mulai dari perencanaan sampai langkah-langkah yang diambil dilapangan. Pengelolaan juga akan bergantung pada bagaimana mengakomodasikan serta mengontrol kebutuhan masyarakat yang tinggal dan hidup disekitar mangrove. Selain itu juga, mangrove juga ditumbuhi berbagai aneka ragam vegetasi khas yang unik. Vegetasi mangrove memiliki beragam tipe dan bentuk. Baik itu akar, daun, bunga, dan buah yang memiliki ciri atau tipe yang berbeda. Begitu juga dengan tipe vegetasi utama mangrove yang berpariasi yang mana diantaranya yaitu berupa:⁴⁷

1. Tipe akar mangrove

a. Akar papan/banir (*buttres*)

Yang mana pada akar ini bentuknya yaitu seperti papan, sangat keras, dan pipih. Akar papan ini biasanya dimiliki oleh pohon mangrove yang hidup di daerah yang lebih dekat ke darat.

b. Akar napas/pasak (*pneumatophore*)

⁴⁶ Ilham Majid, dkk, *Konservasi Hutan Mangrove di Persisir Pantai Kota Ternate Terintegrasi Dengan Kurikulum Sekolah*, Jurnal Bioedukasi, Vol 4, No 2, Maret 2016, h. 491.

⁴⁷ Ahmad Muhtadi Rangkuti, dkk, *Ekosistem Pesisir & Laut Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 79-80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimana pada akar napas atau akar pasak merupakan akar yang muncul dari dalam tanah dengan bentuk seperti pensil. Fungsi akar napas yaitu untuk mengambil udara.

c. Akar tunjang/penyangga (*stiltroot*)

Yaitu dimana akar ini berbentuk seperti cakar ayam. Yang mana akar tunjang merupakan akar yang keluar dari batang dan tumbuh kedalam substrat.

d. Akar lutut (*knee root*)

Yang mana akar ini berbentuk menjalar dan berbentuk seperti lutut. Serta akar lutut pada awalnya tumbuh ke permukaan substrat kemudian melengkung menuju ke substrat lagi yang mana terdapat pada *Bruguire* sp.

e. Akar tipe (*xylocarpus melongensis*)

Akar tipe ini pada dasarnya berbentuk seperti akar pensil, tetapi berukuran lebih besar. Yang mana dalam sistem perakaran mangrove ini yaitu mencegah masuknya garam melalui saringan (*ultra filter*) yang terdapat pada akar (*exclusion*).

2. Tipe daun mangrove

Pengetahuan mengenai tipe daun mangrove pada dasarnya memiliki beberapa bentuk daun yang dimiliki oleh mangrove diantaranya: bentuk daun mangrove tipe *lanceolate*, bentuk daun *elliptical*, bentuk daun *oval*, bentuk daun *obovate*, dan bentuk daun tipe *cordate*. Pada dasarnya daun mangrove mengalami suatu modifikasi yang mampu membatasi hilangnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uap air sebagai bentuk adaptasi terhadap kandungan garam yang sangat tinggi.

3. Tipe bunga dan buah mangrove

Yaitu dimana pada dasarnya bunga pada suatu mangrove mempunyai fungsi sama dengan tumbuhan tingkat tinggi lainnya. Yang mana dalam hal ini ada tujuh bentuk bunga pada mangrove, yaitu *single*, *cyme*, *panicle*, *spike*, *raceme*, *catkin*, dan *umbel*. Sedangkan untuk buah suatu mangrove yaitu dimana berbentuk vivipari dan kriptovivipari. Dimana vivipari adalah buah dengan biji yang sudah berkecambah, dan telah keluar dari kulit buah, meskipun masih melekat di pohon induknya. Sedangkan kriptovivipari adalah merupakan buah yang mempunyai biji yang telah berkecambah ketika masih melekat di pohon induknya, tetapi masih tertutup oleh kulit biji.

4. Tipe vegetasi utama mangrove

Dimana pada tipe vegetasi utama mangrove yaitu terdiri:⁴⁸

- a. *Overwash forest* yaitu merupakan mangrove yang selalu terkena pasang surut.
- b. *Basin forest* merupakan mangrove yang banyak menerima limpasan dari daratan atau terestrial.
- c. *Fringe forest* merupakan mangrove yang menerima pasang surut setiap hari namun sedikit mendapat pasokan air tawar.

⁴⁸ Ahmad Muhtadi Rangkuti, dkk, *Ibid*, h. 86-87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Riverine forest* merupakan mangrove yang sepanjang perairan mengalir seperti anak sungai pasang surut.
- e. *Dwarf mangrove* merupakan mangrove yang kerdil karena jarang terkena pasang surut dan kurangnya nutrisi.
- f. *Hammock* merupakan jenis yang jarang terkena pasang surut dengan tinggi maksimum kurang 5 cm.

Bagi kehidupan manusia, apabila suatu kerusakan hutan mangrove mengalami kerusakan maka akan menjadi suatu bumerang baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilihat terutama dibagian wilayah desa yang berada di area pantai yang terkena abrasi, sehingga prasarana jalan ikut terancam rusak, para nelayan semakin miskin karena diakibatkan penghasilan usaha penangkapan semakin menurun. Begitu juga jeritan para pengusaha tambak di sepanjang pantai, karena gagal panen dan tambaknya (*collapse*) diakibatkan kerusakan hutan mangrove.⁴⁹

D. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hutan Mangrove

1. Peraturan Perundang-Undangan

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia dikenal adanya bermacam-macam hukum, baik itu hukum tertulis yang merupakan peraturan peninggalan zaman Hindia Belanda, maupun hukum tidak tertulis yang merupakan hukum adat yang beraneka ragam. Pembentukan

⁴⁹ Laksmi Rachmawati, *Nilai Ekonomi Mangrove Dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Mangrove di Delta Mahakam*, (Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2003), h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum pada saat ini terasa sangat mendesak, oleh karena dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia dari masa penjajahan Hindia Belanda sampai berlakunya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam era Reformasi yang telah berlaku berbagai jenis peraturan perundang-undangan.

Pada saat Negara Republik Indonesia di proklamasikan, secara vertikal di Indonesia dikenal adanya tiga lapis hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum bagi masyarakat golongan Eropa, hukum bagi masyarakat golongan Bumiputera, dan hukum bagi masyarakat bagi golongan Timur Asing. Pada dasarnya, hukum yang berlaku tersebut dapat juga dibedakan antara hukum tidak tertulis, hukum tercatat, dan hukum tertulis diantaranya yaitu:⁵⁰

a. Hukum tidak tertulis

Hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*) merupakan suatu sinonim dari hukum kebiasaan (*gewoonte recht*), yang di Indonesia juga disebut dengan nama hukum adat (Adat berarti kebiasaan, yakni perbuatan yang diulang-ulang dengan cara atau bentuk yang sama). Hukum tidak tertulis merupakan bentuk hukum yang tertua.

b. Hukum tertulis yang berlaku umum

Hukum tertulis yang berlaku umum (*algemeen geldend*) dan mengikat orang banyak (*algemeen bindend*) serta mempunyai ruang lingkup

⁵⁰ Maria Fariada Indriati S, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007), h. 13-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah manusia (*personengebied*), wilayah ruang (*ruimtegebied*), dan wilayah waktu (*tijdsgebied*) yang lebih luas, tidak tentu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada hukum tidak tertulis.

c. Hukum tertulis

Hukum tertulis selain merupakan wahana bagi hukum baru yang dibentuk setelah Indonesia merdeka dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan yang senantiasa berkembang, juga untuk menjembatani antar lingkup laku aneka adat dan hukum tidak tertulis lainnya, atau untuk mengatasi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis dalam hal pihak-pihak yang menghendakinya.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka pengembangan suatu ilmu dibidang Perundang-undangan terasa semakin diperlukan mengingat sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir sangatlah banyak jumlahnya. Secara normatif sebagai pesan konstitusi, bahwa sanya kekayaan sumber daya wilayah pesisir tersebut dikuasai oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945). Serta harus dikelola sedemikian rupa sehingga memberikan suatu manfaat, baik itu bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang (Pasal 4 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997). Tahun 1990 dikeluarkan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Keputusan tersebut menetapkan jalur hijau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*green belt*) adalah 130 kali rata-rata perbedaan antara pasang tertinggi dan terendah.⁵¹

Selanjutnya pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/MENHUTA/V/2004 menyebutkan bahwa sanya hutan mangrove merupakan jalur hijau daerah pantai yang mempunyai fungsi ekologis dan sosial ekonomi. Dengan standar tersebut wilayah yang tidak dialokasikan untuk kegiatan pertambakan atau yang lain adalah wilayah sempadan pantai dengan lebar 140 meter garis pantai kearah daratan. Namun, kebijakan pemerintah tersebut tidak serta merta membuahkan hasil, karena tingginya permintaan lahan dikawasan persisir untuk berbagai macam peruntukan, tambak, pemukiman atau perumahan, maupun industri.⁵²

Dampak dari penurunan luas area hutan mangrove yang terjadi di beberapa pesisir Indonesia sebagai akibat dari pola pemanfaatan yang ceroboh tersebut, maka pemerintah mencanangkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sektor kehutanan, sektor perikanan serta yang berhubungan dengan jalur hijau (*green belt*). Hingga saat ini, pada kenyataannya untuk pengelolaan hutan mangrove belum ada landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang khususnya mengatur pengelolaan mangrove. Oleh karena itu, landasan hukum yang dijadikan pegangan untuk memayungi pengelolaan dan pelestarian, serta konservasi

⁵¹ Keputusan Presiden No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

⁵² Nuddin Harahab, *Op. Cit*, h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hutan mangrove di Indonesia masih mengacu pada peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan ataupun berdekatan.⁵³

Secara umum proses atau cara pembentukan undang-undang merupakan suatu tahapan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk undang-undang. Proses ini diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan rancangan undang-undang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, oleh Dewan Perwakilan Daerah, maupun Pemerintah.⁵⁴

2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Pada konteks ini negara Indonesia yaitu berdasarkan suatu peraturan tertulis yang dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum.⁵⁵ Yang mana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, diantaranya yaitu:

⁵³ Pramudji, *Penangan Hutan Mangrove Di Kawasan Persisir Indonesia: Suatu Program Yang Sangat Mendesak*, Oseane. Vol. 29, No. 1, Tahun 2004, h. 21.

⁵⁴ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007), h. 9.

⁵⁵ Ni'Matiul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam hukum tata negara, posisi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam artian Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber segala peraturan perundang-undangan, karena dari sanalah semua hukum positif merupakan suatu pejabaran yang lebih rinci dari peraturan yang bersifat umum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keterkaitan antara Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum kehutanan dapat terlihat atau termaktub dalam Pasal 33 ayat 3 yang dinyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 ini dapat kita simpulkan yaitu diantaranya:

1. Memberikan hak penguasa kepada negara atas seluruh sumber daya alam di Indonesia, dan
2. Kewajiban kepada negara untuk mengelola sumber daya alam tersebut untuk kemakmuran sebesar-besarnya seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, secara konseptual ketentuan yang tercantum pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan filosofi dan landasan ekonomi pembentukan peraturan hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehutanan, dan yang akan dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan hukum positif dan peraturan pelaksanaan lainnya.⁵⁶

b. Undang-Undang dan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Keberadaan Undang-Undang dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berada dibawah Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan produk hukum yang sangat strategis. Karena kehadirannya disetujui oleh eksekutif (Presiden) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat). Selain itu, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya implementatif, yakni peraturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga masyarakat, masalah yang berkaitan dengan masalah ketatanegaraan, dan lain-lain. Dasar hukum keberadaan undang-undang sebagai hasil persetujuan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berkaitan dengan ketentuan yang termuat Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 5 di atas yang merupakan rujukan dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, baik peraturan perundang-undangan yang bersentuhan

⁵⁶ Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung dengan kehutanan maupun yang tidak berkaitan langsung. Adapun peraturan perundang-undangan yang bersentuhan langsung dengan hukum kehutanan, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dan
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Hayati (UUKY),

Sementara itu, Undang-Undang yang berhubungan tidak langsung dengan hukum kehutanan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan,
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,
4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam perjalanannya mengalami perubahan dengan adanya protes dari beberapa perusahaan pertambangan yang telah mendapatkan izin pengelolaan dari pemerintah, khususnya perusahaan pertambangan yang mendapatkan konsesi dikawasan hutan, baik hutan produksi maupun hutan lindung. Menyikapi masalah ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374).⁵⁷

Oleh karena itu, dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia. Perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut yang diubah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 karena berada dalam situasi yang sangat sulit.

c. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah pada dasarnya merupakan suatu peraturan yang mana kewenangan sepenuhnya dikeluarkan oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan tertinggi dalam pengelolaan Negara Republik Indonesia. Keberadaan Peraturan Pemerintah

⁵⁷ Supriadi, *Ibid*, h. 11-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diadakan sebagai peraturan pelaksanaan dari sebuah undang-undang, sehingga keberadaannya bersifat implemantatif dan masih perlu ditindak lanjuti oleh suatu peraturan yang lebih rendah, contohnya yaitu Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri maupun Peraturan Daerah.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengaturan kebijaksanaan dibidang hukum kehutanan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah dapat dilihat sebagai berikut:⁵⁸

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Lingkungan,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, dan

⁵⁸ Nuddin Harahab, *Op. Cit*, h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

d. Peraturan Presiden

Dalam Peraturan Presiden pada kenyataannya atau praktiknya terdapat dua muatan, yakni Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden yaitu dimana terdapat suatu muatan yang berkaitan dengan pengangkatan seorang pejabat, misalnya pengangkatan menteri, gubernur, rektor, dan lain sebagainya. Sementara itu, jika Presiden akan mengeluarkan Peraturan Presiden, maka muatannya berkaitan dengan peraturan yang lebih rinci yang menjelaskan suatu masalah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan. Contohnya yaitu: Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan. Oleh karena itu, pembahasan sumber hukum yang berhubungan dengan Peraturan Presiden akan dibahas menggunakan dua muatan tersebut.

Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah merupakan suatu peraturan yang berkewenangan sepenuhnya ditangan Presiden. Antara Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah walaupun keduanya merupakan kewenangan Presiden, tetapi mengalami perbedaan. Peraturan Pemerintah dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatur hal-hal yang bersifat umum, misalnya yaitu Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan yang akan ditindak lanjuti oleh peraturan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih rinci misalnya Peraturan Menteri dan sebagainya. Sementara itu, Keputusan Presiden adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatur yang bersifat khusus atau tertentu, contohnya yaitu Keputusan Presiden untuk mengangkat pejabat Negara. Adapun pengaturan hukum kehutanan yang diatur dengan Keputusan Presiden, diantaranya:⁵⁹

1. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung,
2. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993 tentang Dana Reboisasi,
3. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengenaan, Pemungutan, dan Pembagian Iuran Hasil Hutan,
4. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, dan
5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau perjanjian di bidang Peratambangan yang Berada di Kawasan Hutan.

⁵⁹ Supriadi, *Op. Cit*, h. 13.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020

1. Sejarah Peraturan Pemerintah

Sejak awal tahun 1950-an, Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai program rehabilitasi hutan, akan tetapi tingkat keberhasilan sangatlah rendah sehingga tidak memberikan dampak positif terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup dan ekosistem. Akibat yang ditimbulkan dari kegagalan implementasi kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), negara telah dirugikan 5,2 miliar USD yang berasal dari alokasi dan reboisasi (DR) saja, belum termasuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dibiayai dari sumber dana lain sebagainya.

Secara umum, suatu kebijakan efektivitas implementasi dapat terjadi apabila kebijakan itu dirumuskan atas dasar masalah yang tepat dan terdapat kemampuan untuk menjalankan solusinya dilapangan. Kegagalan implemementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor non teknis yang belum menyentuh penyiapan pra kondisi yang optimal yang mana didalamnya termuat resolusi konflik atas lahan, rekayasa, sosial, penguatan modal sosial, kelembagaan, dan sebagainya. Penyiapan pra kondisi menjadi salah satu aspek yang paling penting yang menentukan suatu keberhasilan implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan.⁶⁰

⁶⁰ Didid Sulastiyo, Dkk, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan*, Jurnal Silvikultural Tropika, Vol, 07 No. 3, Desember 2016, h. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P.09/2013 dan P.87/2014 merupakan sebagian peraturan pelaksana yang dimandatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Hasil analisis ini (*content analysis*) menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa mandat yang di amanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tidak diatur didalam Peraturan Menteri Kehutanan tersebut. Yang mana salah satunya adalah penyiapan pra kondisi yang mencakup pemilihan lokasi yang bebas konflik, resolusi konflik, penguatan modal sosial dan lain sebagainya. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 2 yang mengamanatkan kejelasan status penguasaan lahan P. 09/2013 hal itu diatur.

Kejelasan status penguasaan lahan rehabilitasi hutan dan lahan hanya dilakukan di atas peta tanpa dilakukan pemetaan partisipatif dengan melibatkan *stakeholder* yang terkait, sehingga banyak sekali lokasi rehabilitasi dan reklamasi hutan yang dilaksanakan di kawasan hutan gagal karena adanya konflik lahan.⁶¹ Sedangkan pada P.87/2014 hanya eksplisit disebutkan bahwa lokasi yang akan digunakan untuk rehabilitasi daerah aliran sungai harus bebass konflik, mekanisme pemetaan partisipatif dan strategis penyelesaian apabila terjadi konflik tidak diatur. Kejelasan status penguasaan lahan menjadi hal yang fundamental karena berhubungan dengan *property right* terutama di kawasan hutan negara. Hak kepemilikan

⁶¹ Didid Sulastiyo, Dkk, *Ibid*, h. 183.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh negara (*state property*) menjadi sumber daya akses yang terbuka yang tidak dijelaskan kepemilikannya *insecure property right*.

Dalam hal resolusi konflik Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Pasal 4 huruf 2 poin c, mengamanatkan pemahaman prinsip sistem tenurial pada P. 09/2013 dan P. 87/2014, resolusi konflik dalam kerangka prinsip sistem tenurial tidak diatur, sehingga apabila terjadi konflik lahan di dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan rehabilitasi daerah aliran sungai tidak ada *exit strategy* penyelesaian masalah. Demikian juga penguatan modal.

Pada tanggal 20 Mei 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Peraturan ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 yang mengatur ketentuan yang sama. Meskipun demikian, peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 dinyatakan tetap berlaku. Peraturan Pemerintah Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan merupakan suatu amanat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur bahwa rehabilitasi dan reklamasi hutan dimaksudkan agar bisa memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga suatu daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan agar bisa tetap terjaga.⁶²

⁶² Adrianus Eryan, *Mengenal Pengaturan Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan Dalam PP No. 26 Tahun 2020*, (Jakarta Selatan: Indonesia Center Enviromental Law, 2020), h. 1.

2. Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020

Degradasi hutan yang terjadi serta banyaknya lahan kritis memberikan berbagai macam efek buruk, sehingga diperlukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk menekan degradasi hutan dan memperbaiki lahan kritis. Kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (RHL) mempunyai suatu tujuan untuk memulihkan suatu kondisi secara normal dan lestari sebagai sistem penyangga kehidupan sebagai mana yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang saat ini sudah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.⁶³

Pada dasarnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang baru, rehabilitasi diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi atau penerapan teknik konservasi tanah saja. Ketentuan ini tentu saja menghapus pemeliharaan tanaman dan pengayaan tanaman sebagai bentuk kegiatan rehabilitasi hutan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang lama. Yang mana sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan lama, peran serta masyarakat hanya diatur dalam satu pasal, yaitu melalui konsultasi publik, kemitraan, dan penyampaian informasi. Adapun dalam

⁶³ Aris Jatmiko, Dkk, *Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Menggunakan Analisis Multikriteria*, Jurnal Ilmu Kehutanan, Vol. VI No. 1, Januari-Maret 2012, h. 31.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan baru mempunyai suatu tujuan rehabilitasi hutan yang diperjelaskan yaitu sebagai berikut:⁶⁴

- a. Pada hutan konservasi mempunyai kegunaan yaitu untuk pemulihan ekosistem, pembinaan habitat, dan peningkatan keanekaragaman hayati.
- b. Pada hutan lindung dimana bertujuan untuk memulihkan fungsi hidrologi Daerah Aliran Sungai dan meningkatkan produksi hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan.
- c. Pada hutan produksi yaitu untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi.

Maka dalam hal ini, dalam Peraturan Pemerintah tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan telah mengatur hal-hal baiknya yaitu mengenai mekanisme peran serta masyarakat tersebut. Yang mana dalam hal ini masyarakat dapat saja turut serta sejak dalam proses penyusunan dan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pendanaan. Keikutsertaan masyarakat dapat saja dilakukan melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, sosialisasi, seminar, lokarkaya ataupun diskusi lain sebagainya.

⁶⁴ Adrianus Eryan, *Op. Cit*, h. 5.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian tentang Peran Masyarakat Dalam Mengembalikan Fungsi Hutan Mangrove Di Tinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran serta masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Pasal 51 huruf b belum terlaksana dengan baik. Sedangkan kerusakan hutan mangrove yang berada di kawasan desa tersebut sudah mengalami penurunan disetiap tahunnya.
2. Faktor penghambat dalam mengembalikan fungsi hutan mangrove di Desa Bantayan adalah:
 - a. Faktor kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan,
 - b. Faktor kurangnya sosialisasi pemerintah kepada perangkat desa maupun masyarakat terkait peraturan pemerintah tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
 - c. Faktor kurangnya pengawasan dari pemerintah setempat kepada masyarakat yang menebang hutan mangrove di Desa Bantayan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Untuk bisa diterapkan Peran Masyarakat Dalam Mengembalikan Fungsi Hutan Mangrove Di Tinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah setelah penulis melakukan penelitian maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada masyarakat untuk bisa optimal lagi dalam menjalankan Peraturan Pemerintah agar regulasi tersebut bisa berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat dalam meningkatkan partisipasi dalam mendukung pengembalian fungsi hutan mangrove.
2. Kepada Pemerintah yaitu UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah lebih meningkatkan pengawasan dilapangan di wilayah Unit Kerja KPH XXVI meliputi Kecamatan Mandah dan Reteh bersama perangkat desa Bantayan, sehingga masyarakat tidak berani lagi untuk melakukan penebangan hutan mangrove, apalagi dilakukan oleh oknum yang bukan berdomisili di desa tersebut. Mengingat hutan mangrove yang berada di kawasan Desa Bantayan Kecamatan Mandah masih berstatus hutan sumber daya alam, bukan hutan tanaman rakyat ataupun hutan tanaman desa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrianus Eryan, *Mengenal Pengaturan Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan Dalam PP No. 26 Tahun 2020*, (Jakarta Selatan: Indonesia Center Enviromental Law, 2020)
- Ahmad Muhtadi Rangkuti, dkk, *Ekosistem Pesisir & Laut Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Christine Daymon Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations & Marketing Communications*, (Yogyakarta: PT. Benteng Pustaka, 2008)
- Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1996)
- Deribson Siagian Sugiarto, *Metode Statiska*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Eddy Elminsyah Jaya, *Skenario Berkelanjutan Pengelolaan Hutan Mangrove*, (Balikpapan: Nas Media Pustaka, 2018)
- Erika J, *Mengenal Tanaman Bakau*, (Bandung, Mawar Putra Perdana, 2011)
- Hengki Simanjuntak, *Paradigma Rehabilitasi dan Reklamasi Kawasan Hutan*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2021)
- H.R Mulyanto, *Reklamasi Lahan Rendah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Indriyanto, *Ekologi Hutan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017)
- J Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kulitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012)
- Laksmi Rachmawati, *Nilai Ekonomi Mangrove Dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Mangrove di Delta Mahakam*, (Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2003)
- Maria Fariada Indriati S, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007)
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007)
- Moh. Kusnardi, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 1993)
- Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Kasinus, 2015)
- Ni Matiul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Nurdin Harap, *Penelitian Ekonomi Hutan Mangrove dan Aplikasinya Dalam Perencanaan Wilayah Pesisir*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Purwowibowo, dkk, *Hutan Mangrove Pasar Bagi Rembang*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016)
- Sri Puryono Karto Soedarmo, *Pelestarian Hutan Mangrove dan Peran Serta Masyarakat Pesisir*, (Semarang: Undip Press, 2018)
- Subagyo Jotako, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Sukirman Rahum, Dkk. *Hutan Mangrove dan Pemanfaatannya*. (Yogyakarta: Deepublish 2017).
- Soerjono Soerkanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Pers, 2011).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Jurnal

- Aris Jatmiko, dkk, *Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Menggunakan Analisis Multi Kreteria*, Jurnal Ilmu Kehutanan, Volume VI, No. 1. Januari-Maret 2012
- Cb Herman Edyanto, *Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Proses Reklamasi Untuk Mengantisipasi Bencana di Lingkungan Pantai*, Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana, Vol. 11, No. 1, 2016
- Didid Sulastiyo, Dkk, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan*, Jurnal Silvikultural Tropika, Vol, 07 No. 3, Desember 2016
- Ilham Majid, dkk, *Konservasi Hutan Mangrove di Persisir Pantai Kota Ternate Terintegrasi Dengan Kurikulum Sekolah*, Jurnal Bioedukasi, Vol 4, No 2, Maret 2016
- Pramudji, *Penangan Hutan Mangrove Di Kawasan Persisir Indonesia: Suatu Program Yang Sangat Mendesak*, Oseane. Vol. 29, No. 1, Tahun 2004
- Sulistya Ekawati, dkk, *Analisis Kesiapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta Sebagai Badan Layanan Umum Daerah*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 15 No. 1 Mei 2018
- Tatik Kartika, *Evaluasi Rehabilitasi Lahan Kritis Berdasarkan Trend Ndzi Landsat-s*, Jurnal Venginderaan Jauh, Vol. 16, No. 2, Desember 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabiltasi dan Reklamasi Hutan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 4 ayat 2

Undang-Undang No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Sumber Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir#:~:text=Kerajaan%20Indragiri%20diperkirakan%20berdiri%20tahun,Datuk%20Patih%20atau%20Perdana%20MenteriDiakses pada tanggal 11 Januari 2021, jam 20:42 Wib

<https://www.riau.go.id/home/content/18/kab-indragiri-hilir>, Diakses pada tanggal 11 Januari 2021, Jam 21:15 Wib

<https://www.dictio.id/t/apa-saja-jenis-jenis-hutan-bakau-atau-hutan-mangrove-/70634>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN ANGKET

Dengan Hormat:

Perkenalkan nama saya Jefri Hadi NIM 11720714658, saya merupakan salah satu mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sedang melakukan penelitian pada masyarakat Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir terkait "Peran Masyarakat Dalam Mengembalikan Fungsi Hutan Mangrove Di Tinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan" (Studi Kasus Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir). Untuk itu saya selaku peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk berpartisipasi dalam pengisian angket ini, tidak ada jawaban yang SALAH dalam pengisian angket ini dan identitas Bapak/Ibu/Sdr/i akan dijamin kerahasiannya. Atas bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i, saya ucapkan

I. PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah pertayaan dengan teliti dan pilihlah jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Sdr/i yang paling sesuai.
2. Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu/Sdr/i.

II. IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
- c. Tempat / Tanggal Lahir :
- d. Umur :
- e. Alamat :

III. ANGKET PENELITIAN

A. Persepsi Masyarakat

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i mengetahui hutan mangrove/bakau ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah bermanfaat hutan mangrove bagi kawasan pesisir ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Bagaimana kondisi hutan mangrove di Desa Bantayan Kecamatan Mandah ?
 - a. Baik
 - b. Tidak Baik
4. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i pernah mengetahui program penanaman hutan mangrove di Desa Bantayan Kecamatan Mandah ?
 - a. Pernah
 - b. Tidak Pernah
5. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i pernah terlibat dalam menjaga dan ikut serta dalam program rehabilitasi hutan mangrove di Desa Bantayan Kecamatan Mandah ?
 - a. Pernah
 - b. Tidak Pernah
6. Apakah pernah terjadi bencana alam akibat adanya aktivitas penebangan hutan mangrove di Desa Bantayan Kecamatan Mandah ?
 - a. Pernah
 - b. Tidak Pernah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Apakah ada sosialisasi dari pemerintah setempat terkait Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di Desa Bantayan Kecamatan Mandah ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Apakah ada pengawasan dari pihak terkait terhadap hutan mangrove di Desa Bantayan Kecamatan Mandah ?
 - a. Ya
 - b. Tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"PERAN MASYARAKAT DALAM MENGEMBALIKAN FUNGSI HUTAN MANGROVE DI TINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN"* (Studi Kasus Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir) yang ditulis oleh :

Nama	: JEFRI HADI
NIM	: 11720714658
Program Studi	: Ilmu Hukum
Telah dimunaqasahkan pada :	
Hari / Tanggal	: Rabu, 09 Juni 2021
Waktu	: 08.00 WIB
Tempat	: Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji I
Muslim, S. Ag, SH, M. Hum

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalipus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JEFRI HADI
 NIM : 11720714658
 Tempat/Tanggal Lahir : Bakau Aceh / 11 Oktober 1999
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN MASYARAKAT DALAM MENGEMBALIKAN FUNGSI HUTAN MANGROVE DI TINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN” (Studi Kasus Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir)** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Juni 2021

buat pernyataan



JEFRI HADI

NIM. 11720714658



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul "PERAN MASYARAKAT DALAM MENGEMBALIKAN FUNGSI HUTAN MANGROVE DI TINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN" (STUDI KASUS DI DESA BANTAYAN KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR) ditulis oleh saudara :

Nama : JEFRI HADI
NIM : 11720714658
Program Studi : ILMU HUKUM

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 29 Desember 2020
Narasumber : JONI ALIZON, S.H M.H

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 15 Januari 2021
Narasumber

JALINUS, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

JONI ALIZON, S.H M.H
NIK. 13021704 1

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilindungi Undang-Undang

ciptanya milik UIN Suska Riau

Stat Islam Negeri Universitas Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 28 Januari 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1508/2021

Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: JEFRI HADI
NIM	: 11720714658
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PERAN MASYARAKAT DALAM MENGEMBALIKAN FUNGSI HUTAN MANGROVE DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN (STUDI KASUS DI DESA BANTAYAN KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1508/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

* Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38216
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1508/2021 Tanggal 28 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

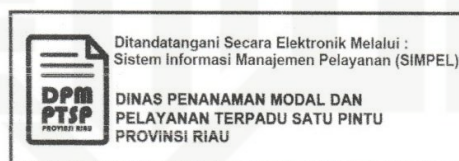
1. Nama : **JEFRI HADI**
2. NIM / KTP : **11720714658**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **"PERAN MASYARAKAT DALAM MENGEMBALIKAN FUNGSI HUTAN MANGROVE DI TINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN"(STUDI KASUS DI DESA BANTAYAN KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**
7. Lokasi Penelitian : **UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 Februari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH
 Jl. Pendidikan No. 06 Telp. (0768) 21138, Email : uptkphmandah@yahoo.com
TEMBILAHAN



SURAT KETERANGAN

Nomor : 045/ UPT-KPH-MANDAH/ 050

Sehubungan dengan akan dilakukan riset guna menyelesaikan penulisan skripsi Yang berjudul : **PERAN MASYARAKAT DALAM MENGEMBALIKAN FUNGSI HUTAN MANGROVE DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN (STUDI KASUS DI DESA BANTAYAN KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)** oleh :

Nama : JEFRI HADI
 NIM : 11720714658
 Jurusan : ILMU HUKUM S1
 Semester : VII (Tujuh)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal di keluarkan surat keterangan ini di buat, Dengan ini kami selaku pemangku kawasan merasa **TIDAK KEBERATAN** atas kegiatan dimaksud.

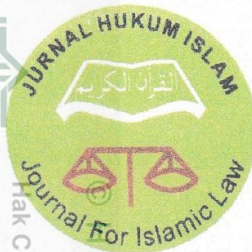
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan
 Pada tanggal : 18 Februari 2021



KEPALA UPT,

JOKO YUNI PURWANTO, S.Hut
 Penata TK. I
 NIP. 19770619 200801 1 012



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : JEFRI HADI
NIM : 11720714658
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : “PERAN MASYARAKAT DALAM MENGEMBALIKAN FUNGSI HUTAN MANGROVE DI TINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN” (Studi Kasus Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir)

Pembimbing: Joni Alizon SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 18 Juni 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Bakau Aceh yang terletak di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, pada tanggal 11 Oktober 1999 dari pasangan suami istri Bapak Suhardi dengan Ibu Halimah yang diberi nama **“JEFRI HADI”** yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Riwayat pendidikan penulis, pada tahun 2011 penulis lulus dari Sekolah Dasar 045 Suntai. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di MTS Batang Tumu, dan pada tahun 2017 penulis lulus dari Madrasah Aliyah Batang Tumu.

Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikannya di salah satu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Selama menjadi mahasiswa UIN SUSKA RIAU, penulis juga mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum di bidang pora selama dua priode.

Selanjutnya pada tahun 2019 penulis melakukan kegiatan magang di Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II A. Setelah itu, penulis melanjutkan Kuliah Kerja Nyata Daring (KKN DR) di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiti Hilir. Pada tanggal 09 Juni 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Peran Masyarakat Dalam Mengembalikan Fungsi Hutan Mangrove Di Tinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan” (Studi Kasus Di Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir) dengan prediket sangat memuaskan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.